

Semakin tinggi rasio pembiayaan hutang, maka akan semakin terdorong bagi pemda untuk lebih transparan pada situs resminya, karena tanggungjawab terhadap pihak eksternal juga akan semakin besar. *Expenditure* memberikan pengaruh yang positif, yang mana semakin besar belanja daerah yang dikeluarkan, maka pemda harus semakin transparan, sebab dana yang digunakan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Semakin tinggi kekayaan pemda dan ukuran pemda, maka semakin tinggi pula dorongan bagi pemda untuk lebih transparan. Pemda yang makmur dan memiliki tingkat aset yang tinggi cenderung mendapat perhatian lebih dari publik, sehingga pengawasan dari masyarakat akan semakin ketat. Opini audit yang baik menjadi suatu bentuk bukti kinerja pemda yang mumpuni. Pemda yang memiliki opini yang baik akan segera mempublikasikan prestasi yang didapatkannya, sehingga semakin tinggi opini audit pemda, maka semakin tinggi juga transparansi yang dilakukan.

2.4. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan implikasi:

1. Mendorong pemda dengan rasio pembiayaan hutang yang tinggi untuk lebih transparan terhadap pihak eksternal.
2. Mendorong kesadaran pemerintah daerah bahwa transparansi merupakan hal yang perlu untuk diperhatikan terutama untuk pemda dengan *expenditure* yang tinggi.
3. Mendorong pemda yang memiliki kekayaan dan ukuran yang besar untuk lebih transparan.
4. Mendorong pemda untuk meningkatkan transparansinya ketika memperoleh opini audit yang baik.

2.5. Keterbatasan Penelitian dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian, keterbatasan penelitian ini adalah:

Menggunakan periode penelitian yang pendek hanya melihat laporan keuangan pada tahun 2014, dikarenakan mayoritas pemda mengungkapkan laporan keuangan secara lengkap dengan periode waktu yang berbeda-beda dan mayoritas mengungkapkan laporan keuangan tahun 2014.

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian diatas, maka disarankan untuk penelitian selanjutnya:

1. Variabel independen yang digunakan untuk mengukur transparansi atau tidaknya suatu pemda tidak hanya dilihat dari informasi keuangannya, tetapi juga dari informasi non keuangannya seperti karakteristik demografi.
2. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang diduga berpengaruh terhadap transparansi seperti kompetisi politik masing-masing daerah, tingkat investasi, temuan audit, kualitas informasi yang diungkapkan dalam *website* dan *press visibility* yang sering digunakan sebagai indikator negara lain dalam menilai transparansi.
3. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan periode yang lebih panjang sehingga lebih baik untuk menggambarkan transparansi.
4. Melakukan penelitian selanjutnya dengan membagi menjadi 2 kategori yaitu kategori Pemda di Pulau Jawa dan Pemda diluar Pulau Jawa.

Daftar Pustaka

- Aminudin, N., M.T.I., dan Dwi, A.D.P. (2014). Langkah-langkah praktis pengembangan e-government untuk pemerintah daerah (pemda) kabupaten pringsewu. *Jurnal TAM (Technology Acceptance Model)*. Volume 3 Desember 2014.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (2014). Profil Pengguna Internet Indonesia 2014. Jakarta: Puskakom UI.
- Bovens, M. (1998). *The Quest for Responsibility: Accountability and Citizenship in Complex Organisations*. Cambridge University Press.
- Dahlan, S. 2012. *Analisis Multivariat Regresi Logistik*. Epidemiologi Indonesia; Jakarta.
- Djalil, R. (2014). *Akuntabilitas keuangan daerah implementasi pasca reformasi*. Jakarta: RMBOOKS PT Wahana Semesta Intermedia.
- Dwirandra, A.A.N.B. (2008). Efektifitas dan kemandirian keuangan daerah otonom kabupaten/kota di Provinsi Bali Tahun 2002-2006. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis* 3.2.
- Ghozali, I. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (Edisi 3)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate Lanjutan dengan Program SPSS*. Universitas Diponegoro; Semarang.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Universitas Diponegoro; Semarang.
- Guthrie, J. (2006). Legitimacy theory: a story of reporting social and environmental matters within the australian food and beverage industriy. *Discipline of Accounting*. The University of Sydney.
- Hadi, W. (2010). Pengaruh likuiditas dan leverage terhadap kemandirian daerah. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*. Vol. 3. No. 1. Januari 2010. Hal 29-51.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Halim, A dan Iqbal, M. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN: Yogyakarta.
- Handayani, S. (2010). Pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2006. *Jurnal ilmu administrasi*. Vol VII, No. 2, Tahun 2010. STIA LAN Jakarta.

- Hardjowiyono, B. (2006). Pengadaan barang dan jasa yang bersih dan bebas dari korupsi. *Bahan presentasi* dalam rapat regional pemprov, pemkab, pemkot Sumatera dalam rangka kormonev inpres 5 Tahun 2004, Batam, 22-23 November.
- Herawaty, N. (2011). Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah kota Jambi. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*. Vol. 13, No. 2, Hal. 31-36.
- Jaya, J.D dan Sisdyani, E.A. (2014). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal pada kelengkapan pengungkapan informasi keuangan daerah melalui situs resmi pemerintah provinsi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 9.1 (2014): 162-179.
- Khairudin., Rosmiati, T., Herry, G.S., dan Rina, E. (2016). The influence of transparency and accountability local government financial report on the level of corruption local government of sumatera area. *The Third International Conference on Law, Business and Government*. Universitas Bandar Lampung, Indonesia. ISSN 2339-1650.
- Klitgaard, R., Ronald, M., dan H.Lidsey, P. (2005). *Penuntun pemberantasan korupsi dalam pemerintahan daerah*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Kurniawan, T. (2009). Peranan akuntabilitas publik dan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Pemerintahan. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*. Vol 16, No. 2. Hal 116-121.
- Lasward, F., Fisher, R., dan Oyelere, P. (2005). Determinant of Voluntary Internet Financial Reporting by Local Government Authorities. *Journal of Accounting and Public Policy*.
- Lesmana, S.I. (2010). *Pengaruh karakteristik pemda terhadap tingkat pengungkapan wajib di Indonesia*. Thesis, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Maston, R. (2010). Characterising Responsibility in Organizational Structures: The Problem of Many Hands in Deontic Logic in Computer Science, eds. G. Governatory and G. Sartor. Berlin: Springer-Verlag, 2010. PP. 274-287. ISBN 978-3-540-70524-6.
- Maulana, C dan Handayani, B.D. (2015). Pengaruh karakteristik, kompleksitas pemerintahan dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. *Accounting Analysis Journal*. Universitas Negeri Semarang.
- Medina, F. (2012). *Faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah di Indonesia*. Skripsi Sarjana. Universitas Indonesia: Depok.
- Minotik, G., Waliyyani., dan Amir, M.(2015). Pengaruh karakteristik pemerintah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di

- Indonesia. *Accounting analysis journal* 4 (2). Universitas Negeri Semarang. ISSN 2252-6765.
- Mulyadi. (2002). *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyani, S. (2013). Analisis pengaruh faktor-faktor keuangan terhadap opini going concern. *Jurnal Publikasi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Munoz, L.A. dan Bolivar, M.P.R. (2015). Determining factors of transparency and accountability in local governments: A Meta Analysis Study. *Lex Localis-Journal of Local Self Government*, Vol. 13, No. 2, pp. 129 - 160, April 2015.
- Mutasowifin, A. (Penyunting). (2008). *Memahami laporan keuangan edisi ketujuh*. Jakarta: PT Indeks.
- Nainggolan, A.T dan Purwanti, D. (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi informasi keuangan daerah via *website*. *Paper SNA*, Lampung.
- Nam, C.W dan Parsche, R. (2001). Looking for appropriate forms of intergovernmental transfers for municipalities in transition economics. *CESifo Working Paper*.
- Nosihana, A dan Yaya, R. (2016). Internet Financial Reporting dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*. Vol. 3(2), 2016, pp 89-104.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun 2008 tentang Pelaksanaan e-Government di Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Pintea, M.O. (2014). Transparency of Local Budgets in The Center Region of Romania. *Review of Economic Studies and Research Virgil Madgearu*, 7(1), 81.
- Piotrowski, S.J., dan Bartelli, A. (2010). Measuring municipal transparency. *In 14th IRSPM Conference, Bern, Switzerland*.

- Puspita, R dan Martani, D. (2012). Analisis pengaruh kinerja dan karakteristik pemda terhadap tingkat pengungkapan dan kualitas informasi dalam *website* pemda. *Jurnal Universitas Indonesia*.
- Pratama, K.A.D., Desak, N.S.W., dan Edy, S. (2015). Pengaruh kompleksitas pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, kekayaan daerah, dan belanja daerah terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah. *Journal SI Ak Universitas Ganeshha Singaraja, Indonesia*. Vol.3, No. 1 Tahun 2015).
- Prastyani, L.P.E., Ni Luh, G.E.S., dan Anantawikrama, T.A. (2016). Pengaruh ukuran pemda, opini audit, dan rasio kemandirian keuangan daerah terhadap implementasi internet financial local government reporting (IFLGR) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi SI*. Vol. 4, No. 1, 2016.
- Rahayu, D.A. (2015). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2013*. Skripsi Sarjana. Universitas Widyatama. Bandung.
- Rahim, W.M dan Martani, D. (2016). Analisis pengaruh tingkat akses internet, kompetisi politik, opini audit, karakteristik pemda, dan karakteristik demografi terhadap pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan *website* pemerintah daerah. *Jurnal Universitas Indonesia*.
- Rahman, A dkk. (2013). Determinan internet financial local government reporting di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XVI Manado*, 25-28 September 2013.
- Rasul, S. (2003). *Pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dan anggaran dalam perspektif UU No. 17/2003 tentang keuangan negara*. Jakarta: PNRI.
- Rinaldi, T., Marini, P., dan Dewi, D. (2007). *Memerangi korupsi di Indonesia yang terdesentralisasi: Studi kasus penanganan korupsi pemerintah daerah*, Bank Dunia: Justice for the Poor Project.
- Santoso, Singgih. (2010). *Statistik Multivariate*. Kelompok Gramedia, Anggota IKAPI, Jakarta.
- Scott, J.K. (2006). "E"the people: Do US municipal government web sites support public involvement? *Public Administration Review*, 66(3), 341–353
- Setyaningrum, D dan Syafitri, F. (2012). Analisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Vol. 9, No.2, hal 154-170. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
- Sinaga, Y.F dan Prabowo, T.J.P. (2011). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaporan keuangan di Internet secara sukarela oleh pemerintah daerah. *Jurnal Universitas Diponegoro*.

- Styles, A.K dan Tennyson, M. (2007). The Accessibility of Financial Reporting of U.S. Municipalities on The Internet. *Journal of Public Budgeting, Accounting dan Financial Management*.
- Subalno. (2009). *Analisis pengaruh faktor fundamental dan kondisi ekonomi terhadap return saham*. Tesis Program Studi Manajemen Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Semarang.
- Suhardjanto, D., Rusmin, Mandasari, P., dan Brown, A. (2010). Mandatory Disclosure Compliance and Local Government Characteristics: Evidence from Indonesian Municipalities. *Journal Public Policy*. January 2010.
- Sulistiyanto, S. (2008). *Manajemen Laba Teori dan Model Empiris*. Jakarta: Grasindo.
- Suparno dan Nanda, R. (2016). Pengaruh kemandirian keuangan daerah, diferensiasi fungsional dan spesialisasi fungsional terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*. Vol. 3(2), 2016, pp 105-118.
- Trisnawati, M.D dan Achmad, K. (2014). Determinan publikasi laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet. *Simposium Nasional Akuntansi 17 Mataram, Lombok*. 24-27 September 2014. Universitas Mataram.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Zimmerman, J. L. 1977. The Municipal Accounting Maze: An Analysis of Political Incentives. *Journal of Accounting Research*.